



JIKA TAK MAMPU KELOLA SAMPAH

Anggota Dewan Sebut Pemda Tak Perlu 'Gengsi'

YOGYA (KR) - Dampak penutupan TPA Piyungan hingga 5 September 2023 mendatang diprediksi bakal menimbulkan persoalan pelik. Anggota DPI Kota Yogya pun menyebut pemerintah daerah (pemda) tidak perlu gengsi jika tidak mampu mengelola persampahan.

"Kita masih dalam kerangka NKRI. Jika daerah tidak mampu, kan masih ada presiden. Tidak usah gengsi. Misal, kalau ke-lurahan tidak bisa meng-atasi persoalan kan ada kema-tren. Ketika kema-tren tidak mampu, ada pemkot. Jika pemkot juga tidak mampu, ada DIY. Kalau DIY tidak mampu ya ke presiden," tandas anggota Komisi C DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, Senin (24/7).

Menurutnya, revitalisasi TPA Piyungan seharusnya sudah didahului dengan perencanaan jauh hari sebelum ini. Ketika tiba-tiba harus ditutup untuk jangka waktu lama, maka bisa menjadi buah simalakama bagi daerah yang selama ini menggantungkannya. Dirinya pun berharap TPA Piyungan kembali dibuka dengan memberikan jangka

waktu. Dengan catatan, dalam jangka waktu terse-but daerah harus memiliki solusi. "Kalau seperti ini dampaknya tidak hanya penumpukan sampah, tapi juga merembet ke hal lain yang justru lebih besar," katanya.

Sigit menjelaskan, koordinasi lintasdaerah sangat dibutuhkan guna mengurai persoalan sampah yang terus berulang. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah diakuinya paling fundamen-tal. Akan tetapi jika sudah menyangkut pengada-an lahan, justru kerap diiku-ti dengan penolakan oleh warga di sekitarnya. Pada-hal pemerintah dinilai me-miliki sumber daya yang mencukupi bahkan mum-puni untuk mengelola sam-pah. Oleh karena itu jika pemda sudah tidak sanggup mengelola, agar tidak perlu gengsi dan segera berkoordi-



KR-Istimewa

Sigit Wicaksono

nasal ke pimpinan di atasnya.

Di samping itu, ego sektoral antardaerah harus dikesampingkan. Fungsi pimpinan daerah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat harus benar-benar diaplikasikan. Jika Kota Yogya tidak terdapat lahan untuk penampungan atau pengelolaan sampah skala terpadu, maka daerah lain yang masih memiliki lahan seharusnya mampu mem-buka diri. Apalagi warga dari kabupaten lain juga banyak yang sehari-hari be-raktivitas di Kota Yogya.

Terkait kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, termasuk lahan pengelolaan sampah, menurut Sigit, tidak akan menjadi per-soalan. Sepanjang menjadi

kebutuhan mendesak apa-lagi sudah memasuki darurat maka lembaga dewan juga bakal mendukung sepenuh-nya. "Jangan takut kalau soal anggaran. Nanti di APBD Perubahan juga bisa dimusyawarahkan. Intinya koordinasi lintasdaerah harus berjalan dan jangan gengsi kalau memang tidak mampu mengelola sampah," tandasnya.

Selain itu, Sigit juga ber-harap ada pendataan lahan-lahan yang sekiranya tidak produktif seperti wedi kengser untuk lokasi pe-nampungan atau pengelolan sampah. Bahkan lahan Sultan Ground atau Pakualaman Ground bisa ditawarkan dengan sistem sewa atau bahkan hibah un-tuk kepentingan tersebut guna meminimalisasi poten-si penolakan warga.

Sementara itu, meski ke-marin TPA Piyungan tidak menerima pasokan sampah, sejumlah depo di Kota Yogya tetap menerima buangan sampah dari masyarakat. Akan tetapi pembuangan sampah hanya boleh dilaku-kan secara mandiri oleh war-ga setempat. Sampah yang dibuang ke depo juga harus sudah terpilah. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005